

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang dimasa silam disebut dengan nama Tumampel yang di dalam bahasa jawa kuno bermakna “Yang dipagari atau Yang Ditapali”. Hal ini dapat ditunjukkan melalui fakta geografis yang memang menunjukkan bahwa Kabupaten Malang secara alamiah dipagari secara melingkar oleh barisan gunung yang membentuk tapal kuda. Satu-satunya pintu masuk ke kawasan ini adalah lembah di sebelah utara yang disebut daerah lawang (pintu).

1.1 Letak Kabupaten Malang

Kabupaten Malang sebagai salah satu kota sejuk yang terletak di Jawa Timur, berjarak 89 km dari Surabaya ibu kota Jawa Timur. Secara astronomi Kabupaten Malang terbentang antara $112^{\circ}17,10'90''$ s/d $112^{\circ}57'00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}4,55,11''$ s/d $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan. Letak kabupaten Malang secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jombang, Pasuruan dan Mojokerto.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo dan Lumajang
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kediri



Gambar 4. Peta Kabupaten Malang

Sumber: www.infokepanjen.com

1.2 Kondisi Fisik Geografis

A. Luas wilayah

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang terluas wilayahnya diantara 38 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Malang yaitu 302.977,05 km², terdiri dari :

1. Pemukiman : 41.490,52 Ha
2. Sawah : 49.882,13 Ha
3. Pertanian tanaman kering : 111.279,65 Ha
4. Perkebunan : 25.924,57 Ha
5. Hutan : 100.502,58 Ha
6. Tanah kosong/padang rumput : 1.039,18 Ha
7. Tanah terbuka/tanah tandus : 3.875,25 Ha
8. Lain-lain : 6.990,12 Ha

B. Geologi

Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi, dimana wilayahnya dipagari

oleh pegunungan yaitu :

1. Sebelah Utara : G. Anjasmoro (2.277 m) dan G. Arjuno (3.399 m)
2. Sebelah Timur : G. Semeru (3.676 m) dan G. Bromo (2.397 m)
3. Sebelah Selatan : Pegunungan Kapur (650 m) dan G. Kawi (2.675 m)
4. Sebelah Barat : G. Kelud (1.731 m)

C. Topografi

Topografi daerah Kabupaten Malang terdiri dari :

- 1) Daerah dataran rendah terletak pada ketinggian 250-500 m di atas permukaan air laut
- 2) Daerah perbukitan kapur
- 3) Daerah lereng Gunung Kawi-Arjuno (500-3300 m di atas permukaan laut)
- 4) Daerah lereng tengger-semeru di bagian timur (500-3600 m di atas permukaan laut).

D. Fisiografi

Kondisi lahan Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah selatan relatif kurang subur. Oleh karena kondisi lahannya sebagian besar relatif subur, maka masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani,

terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, sebagian lainnya berkembang sebagai masyarakat industri.

E. Hidrologi

Sungai-sungai yang mengalir mempunyai pengaruh yang besar bagi perekonomian agraris, yaitu:

- 1) Kali berantas : Membelah Kabupaten Malang menjadi 2 dan wilayah ini berakhir di bendungan karangkates.
- 2) Kali Kunto : Mengalir melintasi wilayah kecamatan pujon dan ngantang dan berakhir di bendungan selorejo (ngantang).
- 3) Kali Lesti : Mengalir di bagian timur, wilayah kecamatan turen, dampit dan sekitarnya. Disamping puluhan anak sungai yang mempunyai arti penting.
- 4) Kali Amprong : Mengalir di bagian Timur, wilayah kecamatan poncokusumo dan tumpang.

F. Jenis Tanah

Jenis-jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang adalah

- 1. Andosol
- 2. Mediteran
- 3. Litosol
- 4. Alluvial

1.3 Wilayah Administrasi Pemerintah

- 1. Kecamatan : 33
- 2. Kelurahan : 12
- 3. Desa : 378
- 4. Rukun Warga (RW) : 3.217
- 5. Rukun Tetangga (RT) : 14.718

Sumber: www.kabmalang.go.id

2. Gambaran Umum Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang awalnya sentralistik mengalami perubahan dengan keluarnya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistim penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan paradigma dari sistem pemerintah yang sentralistik menjadi desentralistik. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dengan prinsip-prinsip pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara otonomi daerah

tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Malang membentuk sebuah lembaga yang menangani masalah penanaman modal yaitu “Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang” yang disahkan dengan Peraturan Daerah No.34 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang dan mulai beroperasi dengan dilantikannya pejabat struktural.

Berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya disebutkan termasuk bidang yang diserahkan bahkan wajib dilaksanakan oleh daerah baik kabupaten maupun kota. Namun demikian pada tanggal 20 februari 2002 telah terbit keputusan Menteri dalam negeri No.67 tahun 2002 tentang pengukuhan kabupaten dan kota, dimana kewenangan Kabupaten/ Kota dalam menerbitkan perijinan tentang Penanaman Modal pada Penanaman modal dalam Negeri (PMDN), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) proses perijinannya disediakan atau menjadi kewenangan propinsi tetapi pembinaannya dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam Kepmendagri tersebut terdapat 5 (lima) kewenangan Kabupaten/ Kota khusus dalam bidang penanaman modal yaitu :

1. Bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal
2. Bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal
3. Bidang pelayanan perijinan penanaman modal
4. Bidang pengendalian penanaman modal.
5. Bidang sistem informasi penanaman modal.

2.1 Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang terdiri

a. Kepala kantor

b. Sub bagian Tata Usaha

c. Seksi Perencanaan

d. Seksi Kerjasama

e. Seksi Penggalian dan Pengembangan Potensi

Sub bagian dan Seksi Sebagaimana dimaksud dalam perda, dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian dan kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana dimaksud dalam dalam perda ini oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi tugas dari masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala kantor

A. Memimpin Kantor Penanaman Modal dalam perumusan kebijakan organisasi, tata perkantoran, penyusunan anggaran rutin dan pembangunan, perencanaan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal.

B. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub bagian Tata Usaha

- A. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta evaluasi dalam pelaporan.
- B. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan bidangnya.

3. Seksi Perencanaan

- A. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan penanaman modal di daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas dan strategi penanaman modal.
- B. Mengumpulkan bahan dalam rangka penelitian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan penanaman modal di daerah.
- C. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penilaian permohonan penanaman modal untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
- D. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pengembangan dan Promosi

- A. Melakukan promosi tentang keunggulan potensi daerah
- B. Melaksanakan kerjasama secara aktif dengan luar negeri
- C. Melaksanakan kerjasama wirausahawan dalam dan luar negeri
- D. Melaksanakan kerjasama dengan badan-badan hukum dalam penyiapan MOU.

5. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

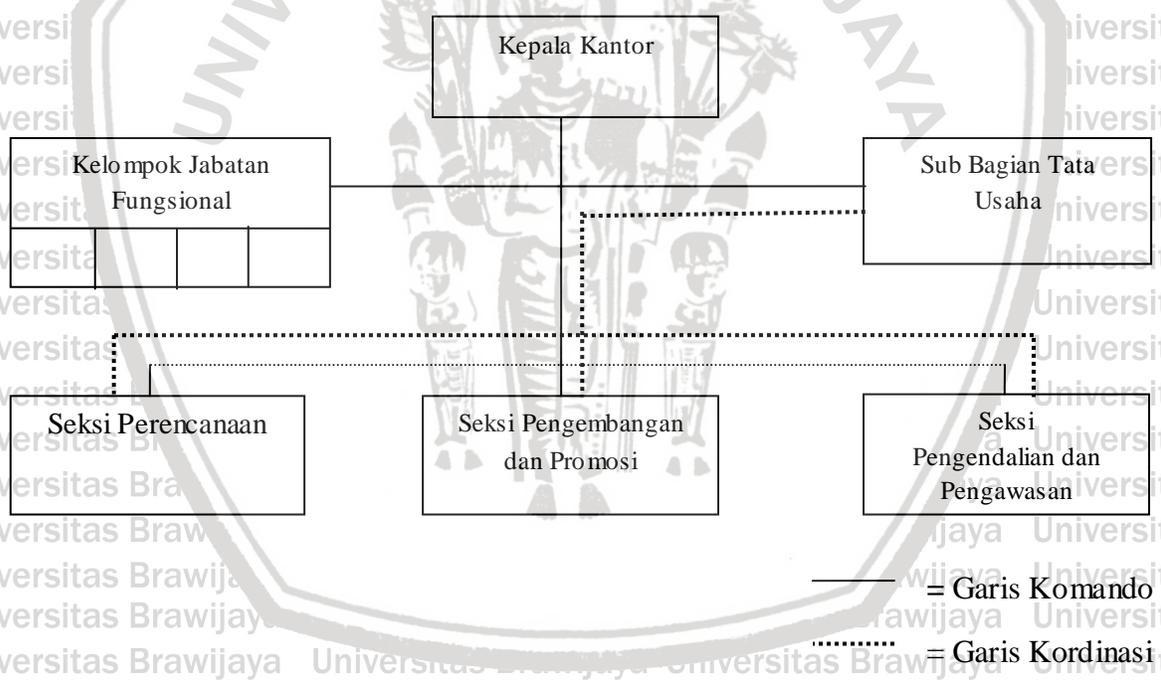
- A. Mengadakan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian yang diperlukan dalam proyek-proyek
- B. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pelaksanaan dan pengkajian obyek di bidang industri, pertanian dan jasa serta proyek pengembangannya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- A. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- B. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Sedangkan tata Kerja dari Kantor Penanaman Modal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pembentukannyatersebuta adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KPM menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal.
- b. Kantor Penanaman Modal dibina dan bertnggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.



Gambar 5. Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal

Sumber: kpm.malangkab.go.id

Tabel 1

Daftar Susunan Pegawai KPM Kabupaten Malang

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Khoirul Fathoni, M Si	Kepala Kantor
2.	Kirni, SH. MM	Kasubag Tata Usaha
3.	Erni Hernawati, S.Sos	Bagian Tata Usaha
4.	Endra Sulistyawati, S.Sos	Bagian Tata Usaha
5.	Hernupiksawati D, S.Sos	Kasi Perencanaan
6.	Subhan Nasruri, S.IP	Bagian Perencanaan
7.	Novita Prihatiningrum, SE	Bagian Perencanaan
8.	Puji Astutik SE. M.Si	Kasi Pengembangan & Promosi
10.	Sriwijaya Pancarini	Bagian Pengembangan & Promosi
11.	Drs. Rakhmad Hariadi M.Si	Kasi Pengawasan & Pengendalian
12.	Siswantoro, S.Sos	Bag. Pengawasan & Pengendalian

Sumber: Arsip KPM Kabupaten Malang 2012

2.2 Visi dan Misi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang

Visi yang dimaksudkan adalah cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan, sehingga dengan visi yang tepat, Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang akan menjadi *leading* sektor bagi pelaksanaan aktivitas Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Penanaman Modal.

VISI KABUPATEN MALANG

Visi Kabupaten Malang adalah " **TERWUJUDNYA KABUPATEN MALANG YANG MANDIRI, AGAMIS, DEMOKRATIS, MAJU, AMAN, TERTIB DAN BERDAYA SAING** " ATAU MADEP MANTEB

a. VISI KANTOR PENANAMAN MODAL

Guna melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang dalam pelaksanaan aktivitas Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Penanaman Modal, dengan tetap mengacu kepada Visi Kabupaten Malang seperti tersebut diatas, maka Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang merumuskan visi sebagai berikut:

" **TERWUJUDNYA PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MALANG YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING** "

Penjelasan Visi :

Arti dan maksud visi tersebut adalah Kabupaten Malang diharapkan menjadi salah satu daerah tujuan utama dalam berinvestasi di Jawa Timur. Dalam hal ini berarti Kabupaten Malang harus memiliki kemampuan daya tarik dan daya saing bagi para investor/penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai daya tarik adalah semua potensi sumber daya yang di miliki oleh Kabupaten Malang baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lain yang mampu memberikan peluang berinvestasi dapat dikelola secara baik dan ramah lingkungan.

Sebagai daya saing Pemerintah Kabupaten Malang dapat memberikan pelayanan yang prima dengan pemberian fasilitas/kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi di wilayah Kabupaten Malang. Dengan demikian diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Malang.

Misi merupakan sesuatu yang dirumuskan untuk menggerakkan organisasi yang menggambarkan arah kemana organisasi ini akan dibawa. Misi ini harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penetapan misi juga diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang keberadaan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang, kegiatan apa dan bagaimana yang akan dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang dengan tetap mengacu pada Misi Kabupaten Malang (*kpm.malangkab.go.id*):

1. Meningkatkan kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat kecil di Kabupaten Malang.
2. Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat di Kabupaten Malang.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malang.

4. Meningkatkan pendidikan dasar bagi masyarakat Kabupaten Malang.
5. Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Malang.
6. Mewujudkan revitalisasi pertanian dan ekonomi kerakyatan.
7. Mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
8. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki “Daya Saing” tinggi yang dilandasi oleh nilai keagamaan, hukum dan nilai sosial budaya.

b. MISI KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN MALANG

Dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan menilai lingkungan strategis yang berpengaruh serta menyelaraskan dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya organisasi yang dimiliki dengan tetap mengacu kepada Misi Kabupaten Malang seperti tersebut diatas, maka Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang merumuskan pernyataan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.
2. Meningkatkan promosi investasi baik di dalam maupun diluar negeri.
3. Mendorong pertumbuhan perekonomian melalui penanaman modal di Kabupaten Malang.
4. Mewujudkan peningkatkan peran kelembagaan Kantor Penanaman Modal.

2.3 Tujuan dan Sasaran Kantor Penanaman Modal

TUJUAN organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan misinya, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2011-2015 sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif;
2. Menarik investor melalui promosi potensi investasi daerah;
3. Mendorong UMKM, Koperasi dan pengusaha kecil untuk menjalin kemitraan dengan investor/calon investor;
4. Memberikan pelayanan informasi dan perijinan dibidang penanaman modal yang bertanggung jawab.

SASARAN adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang dalam mengemban misi organisasi untuk kurun waktu 2011-2015 adalah sebagai berikut (www.malangkab.go.id):

1. Terwujudnya iklim investasi yang lebih menarik dan berdaya saing;
2. Tertariknya investor mengembangkan usaha di wilayah Kabupaten Malang;
3. Terwujudnya kemitraan antara pengusaha dengan petani, nelayan serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.
4. Terwujudnya kemudahan mengakses informasi potensi investasi dan perijinan penanaman modal;

2.4 Kebijakan dan Program Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang maka dibentuk Kantor Penanaman Modal sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang Tahun 2011–2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan target. Secara umum

Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan non perijinan penanaman modal bagi Perusahaan Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN).

Salah satu upaya yang ditempuh dalam melaksanakan tugas adalah melalui suatu sistem perencanaan yang terpadu dan bersifat *continue*, yang lazim disebut dengan Perencanaan Strategik/Strategis. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis dari usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan Strategis harus menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan. Perencanaan Strategis juga merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas, yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang

dihadapi dalam era otonomi daerah ini, dimana serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak dapat diimplementasikan pada seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Penanaman Modal juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dengan menjadikan RPJMD tersebut sebagai acuan dan pedoman dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih periode 2010-2015. Penyusunan Renstra Kantor Penanaman Modal secara sistematis, memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas Kantor Penanaman Modal dilengkapi indikator pencapaiannya mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang.

Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal Tahun 2011-2015 ini juga berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal yang merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra yang mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kantor Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Rencana Kerja terdapat penjelasan tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target pencapaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal.

A. KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditempuh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Mengintensifkan kegiatan promosi di dalam dan luar negeri;
2. Menyusun peluang investasi komoditi unggulan;
3. Memperkenalkan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi kepada investor dan calon investor;
4. Memperbaiki kebijakan penanaman modal;
5. Memberikan insentif daerah kepada calon investor;
6. Melaksanakan pelayanan perijinan penanaman modal satu pintu;

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan penjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam program kerja sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi Investasi;
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Strategi implementasi perencanaan strategis setelah penetapan kebijaksanaan dan progam kerja organisasi adalah perumusan dan penetapan kegiatan atau aktivitas dominan dan vital guna pengukuran masing-masing organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian dari perencanaan strategis adalah merupakan upaya untuk peningkatan kinerja organisasi. Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran secara jelas, yang dirumuskan dalam progam aksi dan dijabarkan kedalam aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah yang disusun dengan dimensi waktu tahunan.

Dengan memperhatikan kriteria spesifik dan teratur sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dan dapat direalisasikan serta diimplementasikan dalam waktu relatif pendek, maka setiap progam kerja Kantor Penanaman Modal di implementasikan melalui beberapa kegiatan
(kpm.malangkab.go id)

a. Kegiatan dalam Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi :

- (1) Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi ;
- (2) Pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- (3) Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
- (4) Kajian Kebijakan Penanaman Modal.

b. Kegiatan dalam Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi adalah :

- (1) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- (2) Pengembangan potensi unggulan daerah;

- (3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;

c. Kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah :

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- (3) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- (4) Penyediaan alat tulis kantor;
- (5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

d. Kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :

- (1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung;
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;
- (4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

e. Kegiatan dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan adalah :

- (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- (3) Penyusunan Laporan Akhir Tahun

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang

Tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal, sehingga yang menjadi obyek/sasaran utama pelayanan adalah masyarakat dunia usaha.

Masyarakat dunia usaha yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Bentuk penanaman modal adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennotschaap* (CV), Koperasi maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing.

Penanaman modal merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan kemajuan perekonomian daerah.

Untuk itu pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sumber daya potensial yang ada di daerah melalui kegiatan pengembangan, pengawasan/pengendalian dan promosi investasi (Dumairy,1996:140).

B. Data Fokus Penelitian

1. Potensi-potensi investasi yang terdapat di Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai banyak potensi yang pada saat ini masih belum tergarap secara optimal, sehingga memerlukan dukungan dan kerjasama para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk mengelolanya. Letaknya yang strategis, ditambah beberapa keunggulan alam yang dimiliki Kabupaten Malang memberikan peluang investasi yang sangat besar bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Malang. Potensi-potensi tersebut yang dikembangkan melalui beberapa sektor unggulan antara lain:

A. Potensi Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Malang telah memberikan kontribusi yang dominan bagi perekonomian daerah. Dengan luas lahan pertanian tanaman pangan seluas 50.011 Ha, yang terdiri dari beberapa klasifikasi lahan pertanian yaitu : sawah teknis, sawah setengah teknis, sawah sederhana dan sawah tadah hujan, sedangkan untuk lahan tegalan mencapai 113.773 Ha.

Peluang potensi sektor pertanian terbagi menjadi 3 sub sektor yaitu tanaman pangan, sayur mayur dan buah- buahan. Hal ini diungkapkan oleh Puji Astutik

SE. Msi selaku Kepala seksi Pengembangan dan Promosi kantor Penanaman

Modal, bahwa:

“Potensi lahan kita ini untuk pesawahan ada sekitar 50 ribu hektare. Kalau ditotal lahan pertanian seluruhnya sekitar 200 ribu hektare. Itu ada yang ditanami padi, jagung, kedelai, buah-buahan, dan sayur-

sayuran. Kalau di Kabupaten Malang yang paling unggul untuk tanaman pangan itu padi, karena padi ini menjadi konsumsi semua masyarakat. Kemudian, jagung, bisa untuk makanan ternak dan bioenergi. Bioenergi itu untuk bahan bakar. Kalau minyak bumi di dalam perut bumi sudah habis, nah jagung ini bisa untuk bioenergi. (Hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal).

B. Potensi Perkebunan

Kabupaten Malang memiliki beraneka ragam perkebunan, antara lain teh, kopi, karet, coklat, kelapa dan kakao yang sangat menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Malang. Selain itu juga terdapat:

- Salak Swaru Gondang Legi

Jenis Salak Malang (swaru) memiliki rasa dan aroma yang khas sehingga membedakan dari buah-buahan salak dari daerah lain. Perkumpulan petani salak yang menamakan dirinya Agribisnis Salaca Group yang berdiri di daerah ini dan beralamatkan di Desa swaru kecamatan Gondang legi kabupaten Malang (arah selatan Kota Malang). Salak kualitas AA perkilogram berisi sekitar 10 sampai 12 buah, kualitas AB perkilogram berisi antara 13 sampai 15 buah, kualitas C perkilogram berisi sekitar 17 buah.

- Perkebunan Cengkeh

Selain potensi wisata alam dan potensi pertambangan, kecamatan Sumbermanjing Wetan merupakan sentra cengkeh bagi Kabupaten Malang Dengan luas areal \pm 3760 Ha, yang menghasilkan cengkeh \pm 845 ton /tahun.

Kecamatan Sumbermanjing Wetan mampu memenuhi kebutuhan cengkeh bagi perusahaan rokok yang berada di Kabupaten Malang.

C. Potensi Peternakan

Potensi peternakan juga sangat cocok bagi para investor. Dalam sektor peternakan Kabupaten Malang merupakan tempat unit produksi keju, sehingga dapat menjadi alternatif terbaik lokasi sapi perah sebagai pemasok bahan baku keju sekaligus kebutuhan pasar akan susu pasterisasi. Hal ini diungkapkan oleh Puji Astutik SE. Msi selaku Kepala seksi Pengembangan dan Promosi kantor Penanaman Modal, bahwa:

“Produk peternakan khususnya susu, masih mempunyai prospek yang cukup baik. Oleh karena itu, usaha peternakan sapi perah memungkinkan terus berkembang yang ditunjukkan dengan pertumbuhan populasi ternak yang ada di Kabupaten Malang. Selain potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang dimiliki di desa Jurug, usaha ternak sapi perah juga didukung sarana prasarana penampungan susu sebagai pusat distribusi susu”. (Hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal).

D. Potensi Kehutanan

Pada sektor kehutanan Kabupaten Malang merupakan pengembangan aneka usaha kehutanan, yaitu Perlebahan Madu Unggul (Apis Mellifera) dan Persuteraan Alam (Tanaman Murbey dan Ulat Sutera). Potensi ini sangat menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Malang, yaitu Paguyuban Peternak lebah dan asosiasi Perlebahan serta pabrik

pengolahan suteraselain itu kabupaten Malang juga memiliki industri primer

Hasil Hutan Kayu. Hal ini diungkapkan oleh Puji Astutik SE. Msi selaku

Kepala seksi Pengembangan dan Promosi kantor Penanaman Modal, bahwa:

“Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti industri penggergajian kayu. Jumlah industri primer hasil hutan diperkirakan lebih dari 100 unit usaha namun hingga saat ini yang berijin baru 30 unit usaha. Industri primer hasil hutan kayu ini memiliki peran yang strategis, baik dalam hal memasok kebutuhan kayu olahan untuk masyarakat maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja di pedesaan dan mendorong tumbuhnya usaha lanjutan. (Hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal).

E. Potensi Perikanan

Potensi sumber daya perikanan laut yang ada di wilayah perairan laut kabupaten malang meliputi penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan untuk berbagai jenis ikan laut / ikan ekonomis penting (komoditas ekspor)

Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Peluang Investasi Perikanan Laut
Di Kabupaten Malang

Jenis Peluang Usaha			
Penangkapan	Budidaya	Pengolahan	Sarana Penunjang
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jumlah Armada 5-10 GT • Penangkapan ikan karang, dan beberapa jenis ikan ekonomis penting 	<ul style="list-style-type: none"> • ikan kerapu/kakap di jaring jaring apung • Rumput laut • Tiram/kerang • Hatchery 	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak ikan • Tepung ikan • Pengusapan ikan • Pengalengan Ikan • Petis • Terasi • Kerupuk Ikan • Fillet Ikan • Abon Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik es • SPBU • BPR • Bengkel Perahu • Toko Bahan dan alat Perikanan • Coldstorage dan Pergudangan • Transportasi Laut (lokal) • Sarana telekomunikasi • Air Bersih • Prasarana jalan

Sumber: (www.kabmalang.go.id)

F. Potensi Pertambangan

Dilihat dari fisiografinya, Kabupaten Malang menunjukkan 15% dari luas daerah mempunyai kemiringan lereng 45% dan 20% dari luas daerah dengan kemiringan lereng antara 10% sampai 20% dan 20% dari luas daerah

merupakan daratan alluvial dan 45% termasuk morfologi gunung api karena daerah ini dikontrol oleh batuan hasil gunung api. Kondisi fisik wilayah Kabupaten Malang kaya akan potensi bahan-bahan tambang, khususnya bahan tambang golongan B dan C, juga beraneka ragam sumber daya mineral lainnya, maka sesuai bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Malang.

Daerah malang selatan merupakan rangkaian pegunungan kapur yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam cukup melimpah berupa hasil tambang bahan galian industri (non metal), yaitu piropilit, bentonite, zylolit, batu gamping, clay, kaolin dan feldstar. Dari bahan tersebut yang cukup potensi untuk dikembangkan sebagai komoditi ekspor adalah barang tambang piropilit dan zylolit. Lokasi dari masing-masing tambang tersebut adalah sebagai berikut:

- **Piropilit** penyebarannya di Kabupaten Malang yaitu di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Ampel Gading dan Kecamatan Bantur. Jumlah cadangan dari ketiga tempat tersebut di perkirakan sampai jutaan ton.
- **Bentonite** terdapat di desa Klepu Sekarbanyu, Tegal Rejo dan Sumber Agung Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Gambingan Kecamatan Pagak.

- **Batu Gamping** Terdapat dalam jumlah yang sangat besar di daerah kalipare, Pagak, Sumbermanjing Wetan dan Donomulyo. Jumlah cadangannya diperkirakan jutaan ton.
- **Marmor dan Batu Krepus** terdapat di Kecamatan Kalipare Desa singkil dan Kecamatan Dampit.
- **Toseki** terdapat di kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur dan Kecamatan Ampel Gading dengan cadangan yang melimpah.

G. Potensi Kerajinan

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki banyak potensi kerajinan antara lain keramik (kecamatan Pagak), kerajinan Mendong / Pandan (Desa Sukolilo Kecamatan Wajak, Desa Turen Kecamatan Turen), kerajinan Besi (Desa Gedog Wetan, Kecamatan Turen), kerajinan kayu (Desa Bululawang, Desa Pakisaji, Desa toyomerto, Desa) Hal ini didukung oleh pernyataan Puji Astutik SE. Msi selaku Kepala seksi Pengembangan dan Promosi kantor Penanaman Modal, bahwa :

“Industri Kerajinan Tikar Mendong Tikar tenun mendong sudah diproduksi masyarakat Desa Blayu, Bebekan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang sejak puluhan tahun silam. Warnanya yang khas mengandung warna merah, hijau dan ungu, ternyata tidak hanya diminati masyarakat lokal saja, namun juga mulai dikenal masyarakat di daerah lain seperti beberapa daerah di Pulau Jawa, Bali, hingga menjangkau negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Selama ini masyarakat masih memanfaatkan cara tenun tradisional untuk

memenuhi pesanan yang datang kepada para pengrajin. (Hasil wawancara pada tanggal 6 februari 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal).

H. Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang kaya akan obyek wisatanya. Dari bermacam-macam obyek wisata yang ada dikelompokkan menurut jenis wisatanya antara lain wisata hiburan, wahana wisata, Wisata pantai, Wisata Budaya, Wisata Tirta dan Agro wisata. Potensi ini sangat menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Malang. Hal ini didukung oleh pernyataan Puji Astutik SE. Msi selaku Kepala seksi Pengembangan dan Promosi kantor Penanaman Modal, bahwa: .

“Potensi ekonomi pariwisata relatif besar dan menjajikan untuk meningkatkan lapangan usaha dan kerja, pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan agar pengusaha tertarik untuk berusaha di bidang pariwisata dan sebaliknya para pengusaha sendiri berminat cukup besar untuk mengembangkan usahanya di bidang pariwisata, sehingga jumlah usaha pariwisata semakin meningkat. (Hasil wawancara pada tanggal 6 februari 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal).

I. Potensi Industri

Dilihat dari sumber daya alam bahan baku yang tersedia maka agro merupakan industri basis dan dominan di Kabupaten Malang yaitu \pm 65%, sementara industri manufaktur \pm 35%. Produk industri agro antara lain: keju, jenang apel dan salak, sari toga, tepung tapioka, rokok, udang beku, ethanol.

Sedangkan produk industri manufaktur antara lain: benang, pakaian jadi,

Sparepart mesin, kantong plastik, rak besi/ logam, kosmetika, alat kesehatan, ketel dan pipa air, knalpot, kompor, bak mobil, amplifier dan shuttle cock.

Hal ini didukung oleh pernyataan Puji Astutik SE. Msi selaku Kepala seksi Pengembangan dan Promosi kantor Penanaman Modal, bahwa:

“ Pengembangan industri dan perdagangan Kabupaten Malang ke depan menganut prinsip ekonomi kerakyatan yang adil dan berimbang bagi segenap pelaku dalam rangka memanfaatkan secara optimal potensi yang tersedia bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat untuk tahun 2001, dimana sektor industri perlu dipacu untuk dapat segera bangkit kembali dari kondisi krisis”.(Hasil wawancara pada tanggal 6 februari 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal).

J. Potensi Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Malang menyimpan banyak potensi yang salah satunya adalah

Potensi Perikanan yang terdapat di seluruh daerah Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang juga banyak terdapat perikanan pantai seperti perikanan pantai Senadang Biru, Perikanan Pantai Pondok Dadap dan lain-lain.

Sedangkan perikanan budidaya merupakan perikanan air tawar yang memiliki

potensi di seluruh Kabupaten Malang dengan seluas 114,82 Ha dengan

didominasi usaha pembesaran ikan untuk konsumsi. Selain budidaya,

ditunjang pula oleh kegiatan penangkapan di perairan umum khususnya

waduk dan sungai. Produksi terbesar perikanan budidaya diperoleh dari

jarring sekat diperairan umum waduk sutami dengan komoditas utama ikan

nila. Selain itu produksi terbesar diperoleh dari tambak di wilayah pesisir

Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan dan Tirtoyudo.

Potensi kelautan Kabupaten Malang belum banyak digarap dan dimanfaatkan.

Potensi tersebut meliputi:

1. Sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan (*non renewable resources*) seperti berbagai jenis tambang, pasir dan batu.
2. Energi kelautan seperti energi gelombang, pasang surut angin dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*).
3. Jasa-jasa lingkungan (*environmental Services*) Seperti tempat-tempat dengan panorama yang indah menyejukan untuk pariwisata, media transportasi dan komunikasi, pengaturan iklim dan sebagainya.

Hal ini didukung oleh pernyataan Puji Astutik SE. Msi selaku Kepala seksi Pengembangan dan Promosi kantor Penanaman Modal, bahwa: .

“Wilayah Kabupaten Malang yang memiliki potensi besar disektor perikanan dan kelautan akan memberikan peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah. Didukung oleh kondisi sumber daya alam yang cukup *representative* dan prospektif serta kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang yang cukup komprehensif dengan mengarah pada keterlaksanaan pembinaan usaha perikanan dan kelautan yang produktif dan berkelanjutan, membuat iklim usaha kelautan dan perikanan cukup aman dan kondusif. Keterbatasan aspek sumber daya manusia serta permodalan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Melihat potensi perikanan yang begitu besar untuk dikembangkan maka peluang investasi ini ditawarkan kepada para investor untuk pengembangan lebih baik.

TABEL 3
POTENSI WISATA BAHARI
DI KABUPATEN MALANG

No	Nama Pantai	Potensi	Potensi Penunjang	Pengelola
I	Wisata Skala Internasional			
1	Pantai Sendang Biru Desa Tambangrejo Kec. Sumbermanjing	1. Mudah dicapai 2. Pemandangan bagus 3. Pasir Putih bersih	1. Pulau Sempu yang berfungsi cagar alam	
II	Wisata Skala Nasional			
1	Pantai Balekambang Desa Srigonco Kecamatan Bantur	1. Pantai putih bersih 2. Pemandangan indah 3. Pencapaian mudah 4. Fasilitas lengkap	1. Pulau Ismoyo 2. Pulau Hanoman 3. Pulau Wisanggeni	PD Jasa Yasa
2	Pantai Jonggring Saloka Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo	1. Ombak bagus 2. Pemandangan indah 3. Fasilitas lengkap	1. Gunung Kombang	PD Jasa Yasa
III	Wisata Skala Lokal			
1	Pantai Kondangmerak Desa Sumbermanjing Kec. Bantur	1. Teluk indah 2. Ombak tidak besar 3. Pasir putih	1. Habitat terumbu karang	
2	Pantai Jonggring Saloko Desa Tempursari Kec. Donomulyo	1. Pemandangan indah 2. Pasir putih bersih	1. Karang Ngebros 2. Kondang Towo	
3	Pantai Sipelot Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo	1. Pemandangan indah 2. Area datar luas	1. Pelelangan ikan 2. Kampung nelayan	

Sumber: Peluang Investasi Kabupaten Malang (www.kabmalang.go.id)

2. Produk Unggulan Di Kabupaten Malang

A. Keju

Di Desa Bambang Kecamatan Wajak telah dibuka unit pengolahan susu segar dari para peternak menjadi keju, untuk mewujudkannya dijalin kerja sama dengan masyarakat Belanda. Meski usianya relatif muda, kualitas produksi keju Kabupaten Malang ini ternyata tak kalah dengan keju impor. Bahkan, katanya menyamai keju Belanda. Dengan dibangunnya pengolahan keju ini diharapkan nasib peternak sapi di Malang Selatan bisa terdongkrak perekonomiannya dan semakin bergairah beternak sapi perah yang saat ini produksi harian susu sapi perah relatif sudah cukup tinggi.

Dengan progam tersebut sungguh telah menunjang program GKD (Gerakan Kembali ke-Desa)

B. Madu

Hasil dari budidaya ternak lebah di Kabupaten Malang adalah Madu. Aneka ragam aroma madu, salah satu diantaranya madu beraroma buah kelengkeng. Harganya ± Rp. 30.000 /botol (belum termasuk biaya pengiriman).

C. Jamu Instan

Dengan peralatan sederhana, pembuatan jamu instan dikerjakan oleh tenaga - tenaga dari Karang Taruna Desa Junrejo. Kemasan jamu instan yang diproduksi antara lain , untuk darah tinggi, pelangsing, vitalitas, rapet legit, jahe, temulawak dan cabe puyang. Harga jamu instan ini berkisar antara Rp. 1.500,00 s/d Rp. 2.500,00.

D. Tikar Mendong

Tikar mendong jenis lipat dan pasaran Dukuh Bebekan Desa Blayu memang tergolong khas dengan warnanya yang selalu mengandung warna merah, hijau dan ungu. Barang diproduksi dengan cara tenun tradisional, untuk memenuhi pesanan yang melebihi ukuran lebar 35 cm mengalami kesulitan dikarenakan terbentur kemampuan peralatan tenun dan mesin jahitnya. Jadi, bila demikian pesanan yang lebarnya melebihi 35 cm, mereka jadikan dalam jenis lipat kendati demikian mereka hanya mampu memproduksi maksimal ukuran lebarnya hanya sebatas 90 cm, sementara untuk ukuran panjang tidak mengalami kesulitan meski mencapai 10 meter.

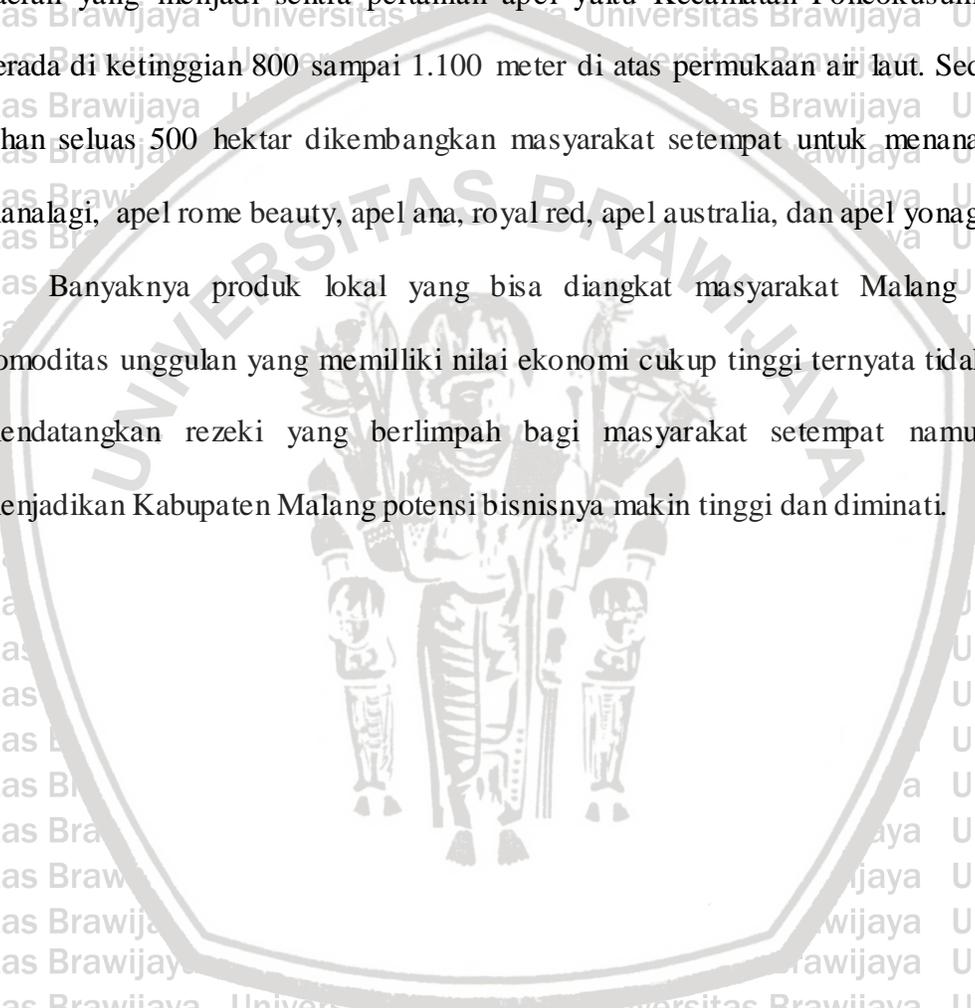
E. Industri Kerajinan Bordir

Disamping kerajinan tikar mendong yang mulai mendunia, Malang juga memiliki potensi bisnis bordir yang diminati pasar mancanegara. Berpusat di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sedikitnya ada sekitar 300 orang tenaga kerja yang dikerahkan untuk memproduksi kerajinan bordir cantik berkualitas internasional. Bahkan bisa dikatakan sekarang ini tidak hanya pasar dalam negeri seperti Surabaya, Gresik, Solo, dan Bali saja yang mulai tertarik dengan bordir Malang, namun pasar luar negeri seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Arab Saudi juga mulai tertarik untuk mengorder bordir Malang karena kualitasnya yang benar-benar terjaga.

F. Potensi Apel Malang

Tidak bisa kita pungkiri bila komoditas apel merupakan salah satu potensi daerah Malang yang sudah cukup populer di kalangan masyarakat luas. Salah satu daerah yang menjadi sentra pertanian apel yaitu Kecamatan Poncokusumo yang berada di ketinggian 800 sampai 1.100 meter di atas permukaan air laut. Sedikitnya lahan seluas 500 hektar dikembangkan masyarakat setempat untuk menanam apel manalagi, apel rome beauty, apel ana, royal red, apel australia, dan apel yonagi.

Banyaknya produk lokal yang bisa diangkat masyarakat Malang sebagai komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi ternyata tidak hanya mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi masyarakat setempat namun juga menjadikan Kabupaten Malang potensi bisnisnya makin tinggi dan diminati.



3. Perkembangan investasi di Kabupaten Malang

Persetujuan investasi yang ada di Kabupaten Malang sampai saat ini menunjukkan bahwa tingkat investasi di Kabupaten Malang bisa dikatakan cukup tinggi atau pada tingkat sedang bila dilihat dari jumlah yang ada. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Kantor Penanaman Modal, bahwa:

“Investasi di Kabupaten Malang bisa dikatakan berada pada tingkat sedang sampai saat ini jumlah penanam (investor) yang tercatat di Kantor Penanaman Modal terdiri dari 36 investor yang tergolong besar, yaitu 17 PMA dengan nilai investasi Rp.3.632.269.947.375 (dengan nilai kurs Rp.9.500) dan 19 PMDN dengan nilai investasi Rp.4.153.146.328.211 serta 106 investor kecil dan menengah serta non fasilitas dengan nilai investasi Rp.4.978.241.900 (Hasil wawancara dengan Bpk.Drs.Khoirul Fathoni, M.Si 11 juni 2012, di Kantor Penanaman Modal) ”.

Dari perkembangan investasi yang ada di Kabupaten Malang, tidak mudah menilai tingkat investasi tersebut karena hal ini cukup relatif, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu. Kirni,SH,MM. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang, dalam wawancara tanggal 10 juni 2012, di Ruang Kerjanya, bahwa:

“Tingkat investasi di Kabupaten Malang tidak bisa dikatakan rendah atau tinggi karena hal ini sangat relatif. Tidak bisa dikatakan rendah karena buktinya cukup banyak juga investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Malang, tidak bisa dikatakan cukup tinggi karena apabila dibandingkan dengan daerah industri lain, Seperti Sidoarjo, cukup rendah. Hal ini juga tergantung dari karakteristik dan kemampuan masing-masing daerah yang berbe-ga-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain”. (Hasil wawancara dengan Ibu. Krirni, SH,MM 11 juni 2012, di Kantor Penanaman Modal)”

Perkembangan investasi di Kabupaten Malang, baik PMDN maupun PMA, dapat dilihat dari data proyek investasi yang tercatat di kantor Penanaman Modal mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang disajikan dalam bentuk tabel 11, dimana proyek-proyek investasi yang ada tersebut, kegiatannya ditangani langsung oleh Kantor Penanaman modal kabupaten Malang:

Tabel 4
DATA INVESTASI PMA/PMDN
Di Kabupaten Malang Tahun 2008- 2011

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah PMA	17	17	19	18
2	Jumlah PMDN	20	20	21	22
3	Tenaga Kerja PMA/PMDN	26.146	26.256	26.253	27.142
4	Nilai Investasi PMA	Rp.2,632,269,947,375	Rp.2,816,312,947,375	Rp.2,980,831,447,375	Rp.3,095,088,637,375
5	Nilai Investasi PMDN	Rp.3,299,051,926,802	Rp.3,303,051,926,802	Rp.3,424,169,486,802	Rp.4,153,146,328,211
	JUMLAH	Rp.6,106,864,874,177	Rp.6,119,364,874,177	Rp.6,405,000,934,177	Rp.7,248,234,965,586

Sumber: kpm.malangkab.go.id

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Malang

a. Faktor Pendukung Investasi di Kabupaten Malang

Dalam setiap kegiatan selalu memiliki hal yang mendukung pada kinerja Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang memiliki yang mendukung dalam pengimplementasiannya sebagai berikut:

1). Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pelaksanaan kinerja yang optimal, dalam kinerjanya ketika sistem yang sudah teratur dengan dilakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja dari pegawai KPM sendiri. Dalam peningkatan kualitas kinerja pegawai, Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang banyak mengirim pegawai untuk melakukan magang, seminar, pelatihan dan diklat. Pelaksanaan kegiatan tersebut selain memperbaiki sistem manajemen mutu, melibatkan seluruh pegawai untuk memahami, melaksanakan serta berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaannya tidak hanya melalui proses *set up*, tetapi juga dengan melakukan pelatihan atau diklat untuk menunjang pengetahuan serta pemahaman dalam upaya memberikan peningkatan pelayanan kepada para investor yang sangat dibutuhkan pegawai.

Kegiatan magang di Badan Penanaman Modal Propinsi diikuti oleh pegawai KPM Kabupaten Malang sebagai dasar pematangan pemahaman penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Malang, hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Kirni, SH, MM Kasubag Tata Usaha, bahwa:

“Kegiatan Magang dan diklat dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai terkait pelaksanaan kerja di bidang penanaman modal, diklat ini berupa pengenalan serta pembelajaran untuk proses pelaksanaan kerja untuk bisa diterapkan pegawai KPM Kabupaten Malang. Tidak semua pegawai dikirim untuk diklat, namun pegawai yang mengikuti diklat ditunjuk oleh *Management Representatif*. Selain diklat secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja pegawai, KPM melakukan adanya *reward and punishment*”. (hasil wawancara pada tanggal 10 juni 2012 pukul 14.30 WIB di Kantor Penanaman Malang)

Peserta magang dan diklat ditunjuk oleh *Management Representatif*, pegawai yang telah mengikuti diklat bertugas untuk membantu proses pengimplementasian serta berkomitmen untuk menjalankannya pada Malang.

Selain pelatihan di Badan Penanaman Modal Propinsi, masih banyak pelatihan yang dilakukan pegawai untuk menunjang pekerjaan, data pelatihan dan jumlah pegawai disajikan pada tabel 4.7, sebagai berikut:

Tabel 5
Data Pelatihan Pegawai KPM Triwulan IV tahun 2011

no	Jenis Pelatihan	Jumlah Pegawai
1	Pelatihan di BPM Propinsi	3 Orang
2	Sertifikasi Kompetensi	2 Orang
3	<i>Activity Community of Practice</i>	4 Orang
4	<i>Employee Engangement Survai (EES)</i>	5 Orang

Sumber: Laporan Kinerja KPM Kabupaten Malang Tahun 2011

2). Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan penunjang bagi terlaksananya pekerjaan, sarana dan prasarana tidak selalu diartikan sebagai alat pendukung namun sarana juga merupakan alat yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, tujuan dari instansi dan tujuan dari pekerjaan. Pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang merupakan suatu kebijakan yang tidak hanya untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga lainnya namun kebijakan untuk selalu menerapkan pada instansi yang bersangkutan. Hal ini menuntut adanya sarana dan prasaran yang memadai agar kualitas mutu juga dapat dilaksanakan. diungkapkan oleh Ibu Kirni, SH, MM Kasubag Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

“proses *set up* menuntut adanya persiapan baik manusianya sendiri dan alat penunjang. Sistem komputerisasi yang memadai, fasilitas internet, fasilitas telekomunikasi, rak pembukuan dan hal lainnya dilakukan untuk menunjang kerja, namun KPM sendiri sudah berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mengurangi pemakaian kertas, dalam hal ini data-data yang dibukukan bersifat umum seperti data kerja, data keuangan itu masih memakai kertas, namun dalam pengerjaan kerja, kita terhubung melalui internet, setiap pekerjaan kita kirim via email, dan selesai pengerjaan kita kirim lewat email juga kepada atasan. Data-data tersebut nantinya ditata sedemikian rupa dan diurutkan sesuai abjad, tanggal dan tahun untuk mempermudah ketika pegawai ataupun ketika dilakukan audit internal perusahaan”. (hasil wawancara pada tanggal 10 juni pukul 14.00 WIB di KPM Kabupaten Malang)

Penunjang dilakukan untuk mempermudah pekerjaan, dengan fasilitas yang ada, pegawai tidak bosan untuk bekerja suasana pendukung pekerjaan dapat dimanfaatkan semua pegawai dengan tidak melanggar norma dan etika yang ada.

b. Faktor Penghambat Investasi di Kabupaten Malang

Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang dalam perjalanan sejak berdirinya hingga kini, tentunya tidak dapat langsung berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun banyak sekali permasalahan atau hambatan / kendala yang harus dihadapi hal ini dapat dilihat dalam permasalahan yang secara makro dihadapi, yaitu “ Mengapa jumlah pertumbuhan investasi di Kabupaten Malang tergolong kecil dibandingkan dengan daerah lain? ”

Faktor penyebab dari permasalahan yang dihadapi tersebut tidak dapat di pisahkan antara faktor yang berasal dari daerah sendiri dengan faktor-faktor lain yang bersifat nasional dan bahkan internasional. Adapun penyebab atau penghambat bagi peningkatan investasi di Kabupaten Malang berdasarkan dokumen Kantor Penanaman Modal mengenai “ Upaya Peningkatan Kinerja Kantor Pananaman Modal Kabupaten Malang”. Disebutkan antara lain karena stabilitas keamanan dan politik nasional yang masih belum sepenuhnya mendukung, juga adanya kesan dari investor luar negeri bahwa iklim investasi di Indonesia belum sepenuhnya terjamin karena masih banyaknya demo-demo buruh, serta belum adanya pemberian fasilitas lebih bagi investor.

Menurut Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang, faktor yang paling berpengaruh terhadap investor untuk menanamkan modal adalah faktor keamanan. Sebagai hasil wawancara berikut:

“Saat ini, Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat investasi adalah faktor keamanan. Sebenarnya Kabupaten Malang cukup terjamin keamanannya, namun faktor keamanan tidak bisa dilihat dari satu daerah saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keamanan secara nasional. Hal ini sangat berpengaruh terhadap minat calon investor untuk menanamkan modalnya, terutama bagi calon investor asing. Banyaknya konflik dan demonstrasi di daerah bisa membuat takut calon investor akan jaminan keamanan terhadap modal yang ditanamkannya. (Hasil wawancara dengan Bpk. Khoirul Fathoni, M.Si, tanggal 11 juni di ruang kerjanya).

Sedangkan faktor perpajakan di Kabupaten Malang dinilai tidak terlalu memberatkan bagi investor , bahkan pemerintah Kabupaten Malang telah menerapkan kebijakan penurunan tarif pajak penerangan jalan bagi industri, dari 5% menjadi 3% bagi investor yang menanamkan modal (Hasil wawancara dengan Bpk. Khoirul Fathoni, M.Si, tanggal 11 juni di ruang kerjanya).

Sedangkan faktor penghambat yang secara khusus terdapat di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. kesulitan mendapatkan izin mendirikan perusahaan yang berada pada lokasi tanah milik Perhutani karena menghadapi proses yang panjang dan berbelit-belit.
2. Proses perijinan yang panjang dan memakan waktu lama.
3. Belum ada keterkaitan antar instansi.

Ditambahkan hasil wawancara dengan Ibu. Kirni,SH, MM Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kantor Penanaman Modal kabupaten Malang, tanggal 12 juni 2012, di ruang kerjanya mengatakan bahwa:

“Salah satu penyebab kurangnya investasi di Kabupaten Malang adalah belum adanya kawasan industri, dimana adanya kawasan industri juga diperlukan oleh investor karena dapat memberikan manfaat-manfaat tertentu bagi investor”. (Hasil wawancara dengan Ibu. Krirni, SH, MM 11 juni 2012, di Kantor Penanaman Modal)”.

Ditambahkan hasil wawancara dengan Bpk. Slamet supriyono Staff Humas PT.nitrans Indonusa Utama sebagai sabagai salah satu investor di Kabupaten Maang, tanggal 17 juli, di ruang kerjanya mengatakan bahwa:

"Birokrasi dan ketidakpastian hukum menjadi yang jadi hambatan bagi perusahaan dalam menjalankan usaha. Contohnya, luasan izin lahan bagi kepentingan investasi yang berubah-ubah karena adanya berbagai peraturan baru yang diterbitkan, menimbulkan ketidakpastian usaha bagi para investor. Tidak hanya itu, pengurusan surat-surat izin tersebut juga harus melalui lapisan birokrasi yang bertumpuk,dan berbelit,"(Hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2012 pukul 10.00 WIB di kantor PT. Unitrans Indonusa Utama).

5. Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam meningkatkan Investasi

Jalan keluar yang ada di usahakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam memecahkan masalah yang dihadapi , yaitu untuk meningkatkan investasi telah diwujudkan dalam setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal, juga beberapa usaha lain, baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih berupa perencanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang meliputi:

1. Promosi Potensi daerah

Kegiatan promosi potensi daerah ini dilaksanakan dalam rangka mempromosikan potensi maupun produk unggulan yang mempunyai nilai jual tinggi yang diharapkan maupun menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu juga mempromosikan Prosedur Perijinan Penanaman Modal di Kabupaten Malang yang dijalankan dengan sistem *One stop service*. Hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dalam menyelenggarakan Standar pelayanan minimal dalam bidang penanaman modal serta pelaksanaan kerjasama dengan investor dari luar maupun dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya.

Dalam kegiatan ini Promosi potensi daerah ini, sampai dengan bulan september 2011, Kantor Penanaman Modal telah mengikuti beberapa even pameran yang berskala nasional / internasional yaitu :

- a. Pameran Industri Bahari di Surabaya (9 s/d 14 april 2011).
- b. Pameran Hari Keluarga Nasional di Jakarta (2 s/d 5 juni 2011).
- c. Pameran Industri kecil di TMII Jakarta (20 s/d 25 juni 2011).
- d. Pameran Agro dan Food Expo di Jakarta Convention Center (1 s/d 4 September 2011).

Kegiatan promosi potensi daerah ini dilakukan untuk memperkenalkan Kabupaten Malang dan menarik para investor untuk menanamkan modalnya.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah ini Kantor tidak

lepas dari permasalahan, Hal ini diungkapkan oleh Puji Astutik SE. Msi selaku Kepala seksi Pengembangan dan Promosi KPM, bahwa:

“Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah minimnya dukungan media promosi seperti brosur, pamflet, booklet, buku profil potensi, maupun CD Rom tentang potensi unggulan Kabupaten Malang dan minimnya dukungan dana. Usaha pemecahannya adalah meminta dukungan dari instansi terkait sehubungan dengan penggandaan brosur/ pamflet/ CD Rom serta mengalokasikan dana sesuai prioritas kegiatan pameran. Tindak lanjutnya, kita mengadakan sendiri pembuatan media promosi yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal serta mengajukan kenaikan dana untuk tahun anggaran berikutnya”. (Hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal).

2. Penyusunan Buku Profil Potensi dan Brosur /Pamflet/CD Rom tentang potensi unggulan Kabupaten Malang.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan promosi potensi daerah Kabupaten Malang dengan menyediakan sarana atau media informasi yang memudahkan masyarakat maupun investor untuk mengetahui seberapa besar peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Malang untuk itu Kantor Penanaman Modal menyediakan Buku Profil Potensi Kabupaten Malang yang berisi seluruh potensi meliputi bidang pertambangan, perkebunan, pertanian, industri, perikanan, kelautan dan pariwisata.

Dalam kegiatan pembuatan Brosur/Pamflet/ CD Rom tentang Potensi unggulan ini telah dibuat Pamflet sebanyak 3000 eksemplar adapun materi yang ditampilkan berisi potensi di bidang pertambangan, perkebunan,

pertanian, industri dan pariwisata sedangkan CD Rom sebanyak 20 keping.

Adapun materi yang ditampilkan adalah potensi dan peluang usaha meliputi

bidang pertambangan, perkebunan, peternakan, pertanian, industri dan

pariwisata yang di Kabupaten Malang. Dalam kegiatan penyusunan buku

profil investasi juga terdapat beberapa kendala. Hal ini diungkapkan oleh Puji

Astutik SE. Msi selaku Kepala seksi Pengembangan dan Promosi Kantor

Penanaman Modal Kabupaten Malang, bahwa:

“ Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini minimnya informasi dan data yang diperoleh dari masing-masing unit kerja mengenai jumlah potensi yang mempunyai nilai jual tinggi. Usaha pemecahannya adalah mencari informasi maupun data langsung pada sumbernya serta melihat langsung ke obyek dan lokasi pengambilan data . Tindak lanjutnya adalah menghimpun, menyeleksi dan memasukkan informasi maupun data yang mempunyai potensi untuk dipromosikan serta memiliki nilai cadangan (deposit) yang tinggi di dalam CD Rom. (Hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal).

3. Penyelenggaraan Forum Investasi dan Temu Usaha

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pertemuan dan hubungan

kerjasama dengan para Asosiasi Pengusaha Asing, Kamar dagang dan Industri

Kedutaan Besar Negara Asing, Konsulat Jenderal, Pengusaha Industri Kecil,

maupun dengan pihak Badan Penanaman Modal Pusat dan Propinsi Jawa

Timur. Disamping kegiatan tersebut juga diadakan studi banding dengan

fokus pemanfaatan areal sekitar hutan yang terdapat di Kabupaten Malang,

sehingga manfaat dari kegiatan ini diharapkan mampu menjaring para investor

sekaligus dapat memberikan informasi secara jelas dan akurat mengenai potensi serta produk unggulan yang terdapat di Kabupaten Malang.

Adapun kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman

Modal adalah pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, Lembaga kemasyarakatan yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan

penanaman modal dan investasi serta pelaksanaan kerjasama dengan investor dari luar dan dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten

Malang sehingga tercipta hubungan yang baik. Dalam penyelenggaraan forum investasi dan temu usaha terdapat beberapa kendala. Hal ini diungkapkan oleh

Puji Astutik SE. Msi selaku Kepala seksi Pengembangan dan Promosi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang, bahwa:

“Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan para Asosiasi Pengusaha Asing, Kedutaan Besar Negara Asing, Konsulat Jenderal maupun dengan Pengusaha Industri Kecil (UKM). Usaha pemecahannya adalah meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama secara intensif serta berkesinambungan dengan pihak badan Badan Penanaman Modal Pusat maupun propinsi Jawa Timur, tindak lanjutnya adalah mengikuti secara aktif setiap kegiatan Forum Investasi atau Temu Usaha yang diselenggarakan oleh pihak Badan Penanaman Modal Pusat maupun Propinsi Jawa Timur. (Hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal)”.

4. Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan PMDN dan PMA

Kegiatan ini merupakan monitoring ke sejumlah PMA dan PMDN yang ada di Kabupaten Malang untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha dan produksinya dengan menjalin hubungan yang baik dengan para investor serta membantu penyelesaian/ memecahkan masalah yang dihadapi para investor dalam melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Malang.

Hasil wawancara dengan Bpk. Drs. Rakhmad, M.Si Kepala seksi Pengendalian dan Pengawasan, Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang, tanggal 22 juni 2011, di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa:

“ Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap PMDN dan PMA dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung monitoring berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), yang wajib disampaikan oleh PMDN dan PMA kepada KPM atau BPM atau BKPM per semester bagi PMDN dan PMA yang belum memiliki IUT dan pertahun bagi PMDN dan PMA yang sudah memiliki IUT, Sedangkan monitoring secara langsung dilakukan datang ke proyek investasi“(Hasil wawancara pada tanggal 22 juni 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal).

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah keterbatasan sarana mobilisasi dalam pelaksanaan monitoring secara langsung ke proyek PMDN maupun PMA. Usaha pemecahannya adalah dengan pengalokasian anggaran untuk penambahan sarana transportasi dinas. Dalam pelaksanaan monitoring PMA dan PMDN ini Kantor Penanaman Modal menggunakan pedoman dalam rangka pelaksanaan pengendalian bidang penanaman modal. (Hasil wawancara pada tanggal 22 juni 2012 jam 10.00 WIB di Kantor Penanaman Modal).

5. Peningkatan Kinerja Kantor Penanaman Modal

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bagi personil Kantor Penanaman Modal khususnya bidang penanaman modal maupun bidang lain yang terkait dengan peningkatan sumber daya aparatur. Adapun kegiatannya meliputi magang, pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, maupun studi banding. Kegiatan magang yang dilakukan antara lain dengan mengirimkan beberapa personil KPM untuk magang di Badan Penanaman Modal Propinsi pada bulan Mei 2011. Dengan kegiatan ini diharapkan kinerja Kantor Penanaman Modal dapat meningkat serta diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada para investor. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal dalam rangka perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal Tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Kinerja Kantor Penanaman Modal.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kantor Penanaman Modal juga melakukan usaha-usaha lainnya dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat menyangkut bidang penanaman modal serta memberikan prosedur perijinan yang sederhana, mudah, cepat dan aman bagi masyarakat maupun investor, khususnya dalam hal ini adalah mempermudah dan mempercepat pemberian ijin (Surat

Persetujuan Investasi) kepada calon investor dan mendampingi dalam pengurusan IMB, HO dan ijin-ijin lainnya. Hal ini didukung dengan pernyataan Bpk Khoirul Fathoni, M.Si Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang, bahwa:

“Untuk mendukung pelayanan yang optimal maka, Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan kebijaksanaan tentang perijinan dengan manajemen yang dipakai dalam menarik/ menjaring investor dengan motto “mudah dan aman”, maksudnya Pemerintah Kabupaten Malang dalam melayani investor tidak berbelit-belit secara tata administrasi pemerintahan, asalkan semua persyaratan yang telah diterapkan telah terpenuhi. “Aman” maksudnya pemegang ijin investasi akan dijamin terbebas dari pungutan luar adan adanya kepastian hukum”. (Hasil wawancara dengan Bpk. Khoirul Fathoni, M.Si, tanggal 11 juni di ruang kerjanya).

- b. Membuat data lapangan investasi yang di prioritaskan, di masing-masing usaha di lapangan (sektor-sektor) yang memuat lokasi obyek investasi jenis bahan baku, luas areal, perkiraan produksi, sarana dan prasarana yang tersedia, penunjang penanaman modal, yang dibagikan kepada calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri, kedutaan besar negara sahabat dan pameran-pameran. Untuk lebih jelasnya mengenai bidang-bidang usaha yang diprioritaskan oleh kabupaten malang dapat dilihat dalam lampiran.

- c. Penetapan kebijakan pemerintah Kabupaten Malang tentang pemberian insentif bagi investor, antara lain berupa penurunan tarif pajak penerangan jalan bagi industri yang semula sebesar 5 % (Peraturan Daerah kabupaten Malang No.6 Tahun 1998) menjadi hanya 3 % (Peraturan Daerah Kabupaten

Malang No.9 Tahun 2002). Faktor perpajakan tidak terlalu memberikan bagi investor seperti yang diungkapkan Bpk. Khoiril Fathoni, M.Si selaku kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang, bahwa:

Faktor perpajakan di Kabupaten Malang dinilai tidak terlalu memberatkan bagi investor, bahkan pemerintah Kabupaten Malang telah menerapkan kebijakan penurunan tarif pajak penerangan jalan bagi industri, dari 5% menjadi 3% bagi investor yang menanamkan modal (Hasil wawancara dengan Bpk. Khoiril Fathoni, M.Si, tanggal 11 juni di ruang kerjanya).

- d. Adanya perencanaan dan kebijakan pemerintah kabupaten tentang zona atau kawasan industri di Kabupaten Malang. Sampai saat ini kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPM dalam rangka pembentukan kawasan investasi atau kawasan industri adalah mengadakan studi banding daerah lain yang sudah memiliki kawasan industri, seperti pasuruan, Gresik, dan Sidoarjo.
- e. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi.
- f. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam menciptakan stabilitas ekonomi politik dan sosial dalam rangka mewujudkan rasa aman dalam investasi.

Dengan demikian akan terwujud kesepahaman, yaitu sikap dan cara pandang yang sama dari dinas atau instansi terkait dalam rangka menjaring investor yang akan masuk ke Kabupaten Malang.

C. Analisa dan Interpretasi Data

1. Pengembangan Potensi di Kabupaten Malang

Potensi daerah atau disebut juga sumber daya daerah merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam melakukan pembangunan ekonomi suatu daerah, bahkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki daerah itu, baik potensi alam, potensi finansial, potensi teknologi maupun potensi manusianya dan potensi lainnya. Walaupun potensi sumber daya daerah tersebut bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan ekonomi suatu daerah, namun pada umumnya yang ekonominya maju adalah daerah yang mempunyai potensi yang tinggi, sebaliknya daerah yang terbelakang dalam pembangunan ekonominya adalah daerah yang ekonominya minim potensi. Hal ini terjadi karena potensi-potensi daerah tersebut sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan dalam dunia usaha, Sebagaimana disebutkan dalam Arsyad (1999:122) bahwa pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha misalnya lahan, sumber keuangan infrastruktur dan sebagainya.

Dari penyajian data dapat dilihat selain letaknya yang strategis, kondisi alam yang menguntungkan, potensi daerah yang sekaligus sebagai sektor-sektor unggulan Kabupaten Malang juga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi yang meliputi potensi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, kerajinan, pariwisata, industri dan kelautan. Potensi-potensi inilah yang ditawarkan

oleh Pemerintah Kabupaten Malang dimana potensi-potensi yang dimiliki tersebut masih banyak yang belum digali dan dimanfaatkan secara optimal.

Potensi daerah juga menimbulkan daya tarik tersendiri bagai investor dalam memutuskan lokasi investor terutama disebabkan oleh faktor kedekatan dengan bahan baku industri karena dengan mendirikan pabrik dekat dengan bahan baku, selain mempermudah dalam perolehan bahan baku juga dapat menghemat biaya transportasi. Selain dengan potensi yang dimiliki tersebut, iklim usaha dan investasi di Kabupaten Malang juga didukung oleh kualitas SDM yang tinggi serta penyediaan infrastruktur yang cukup memadai.

Dalam menawarkan potensi-potensi yang dimiliki tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui KPM, bekerjasama dengan Bapekab menyajikan perhitungan perkiraan kebutuhan dana investasi yang dicantumkan dalam buku profil investasi, yaitu meliputi jumlah modal yang diperlukan, biaya operasional, hasil penjualan dan keuntungan. Dengan demikian para calon investor dapat memperhitungkan besarnya modal yang dibutuhkan dan besarnya keuntungan yang diperoleh nantinya serta dapat menilai kelayakan financial dari suatu proyek investasi berdasar beberapa hal antara lain:

- a. NVP (*Net Present Value*), yaitu selisih antara nilai arus manfaat sekarang dengan nilai arus biaya sekarang. Suatu proyek dinyatakan bermanfaat jika NPV-nya lebih dari atau sama dengan nol.

- b. IRR (*Internal Rate of Return*) atau disebut Tingkat Pengembalian Internal adalah nilai tingkat diskonto sosial (*social discount rate*) yang menyebabkan nilai NPV sama dengan nol.
- c. POT (*Pay Out Time*) atau Pay Back Period adalah periode yang dibutuhkan oleh suatu instansi untuk menghasilkan uang tunai yang cukup untuk menutup pengeluaran modal Awal secara penuh.
- d. ROI (*Return On Investment*) yaitu tingkat pengembalian investasi yang bisa diberlakukan oleh suatu proyek investasi.
- e. BEP (*Break Even Point*) yaitu tingkat *output* dan penjualan jangka pendek dimana produsen menghasilkan suatu jumlah yang hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabelnya tidak untung ataupun rugi.

Sehingga calon investor lebih mudah dalam mempertimbangkan rencana investasinya dan terutama adalah dengan perhitungan perkiraan investasi tersebut dapat lebih meyakinkan kepada calon investor bahwa proyek investasi tersebut layak untuk dilakukan dan diharapkan nantinya dapat direalisasikan investor yang berminat.

Melihat potensi daerah, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang tersebut dapat dinilai sangat tinggi, dimana potensi tersebut belum tentu juga dimiliki oleh daerah lain. Inilah salah satu keunggulan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, dengan potensi daerah yang tinggi belum tentu juga dapat menjamin keunggulan ekonomi daerah tersebut, jika potensi tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Dengan pengelolaan dan

emanfaatan potensi daerah secara baik dan benar dapat member masukan yang besar bagi PAD, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2. Perkembangan Investasi di Kabupaten Malang

Dari suatu perkembangan investasi dapat dinilai seberapa besar atau tinggi tingkat investasi di suatu daerah. Namun sebenarnya tidak mudah menilai tingkat investasi Kabupaten Malang, Apakah termasuk tinggi atau rendah karena hal ini dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dilihat dari jumlah investasi yang ada, dilihat dari berbagai perbandingan dengan daerah lain dan dapat dilihat dari rasio antara jumlah investasi dengan jumlah potensi investasi yang belum digali dan dimanfaatkan dengan optimal oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Penanaman Modal, sebagaimana telah disajikan di depan data proyek penanaman Modal, baik PMDN maupun PMA, yang telah dilakukan di di kabupaten Malang, mulai dari 2008-2011 dapat dilihat bahwa tingkat investasi di Kabupaten Malang memang cukup tinggi, baik dilihat dari jumlahnya maupun besarnya investasi yaitu, 18 PMA dengan nilai investasi sebesar Rp.3.095.088,637,375 dan 22 PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 4.153,146,328,211. Namun bila dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah industri, jumlah ini dinilai masih kurang, dimana persetujuan

investasi di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah sebanyak 108 proyek dari PMA dan 208 dari PMDN.

Berdasarkan sektor ekonominya, proyek PMDN di Kabupaten Malang sebagian besar adalah industri pada sektor sekunder, yaitu merupakan industri pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, seperti industri tekstil, makanan, pengolahan kayu, kertas dan lain-lain sebesar 76% sedangkan lainnya merupakan industri pada sektor primer yaitu industri yang mengelola sektor primer seperti kehutanan, pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan dan lain-lain sebesar 20% dan industri pada sektor tersier yaitu industri yang hasil produksinya lebih bersifat jasa seperti industri angkutan, perdagangan, perkantoran, perumahan, perhotelan, restoran dan lain-lain sebesar 4%.

Dari data proyek PMA di Kabupaten Malang, jumlah proyek dan nilai investasi terbesar berasal dari USA sebanyak 3 buah proyek dengan nilai investasi US\$ 74.100 dan peringkat kedua adalah dari Jepang sebanyak 2 buah proyek sebesar US\$ 24.800.

Berdasarkan sektor ekonominya proyek PMA tersebut terdiri dari industri pada sektor sekunder 55,5% industri pada sektor primer 33,3 % dan industri sektor tersier 11,1 %.

Dilihat dari bidang usahanya proyek PMDN dan PMA yang ada di Kabupaten Malang pada umumnya merupakan *Resources Base Industry*, yaitu industri yang memproses hasil dari sektor primer, misalnya bahan pertanian dan bahan makanan.

Hal ini sesuai dengan potensi daerah Kabupaten Malang yang memerlukan industri-

industri yang mengelola bahan primer tersebut, namun tidak menutup kemungkinan berkembangnya industri-industri lain seperti industri manufaktur dan industri jasa.

Perkembangan investasi di Kabupaten Malang belum bisa dipastikan adanya peningkatan setiap tahunnya, namun dengan masih banyaknya potensi investasi yang belum digali dan dimanfaatkan, maka peluang investasi di Kabupaten Malang sangat terbuka lebar dan masih mungkin untuk terus berkembang. Selain itu, dengan didukung oleh iklim usaha dan investasi yang cukup kondusif, prospek investasi di Kabupaten Malang sangat baik.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Malang

a. Faktor Pendukung Investasi di Kabupaten Malang

1). Sumber Daya Manusia

Peningkatan kinerja SDM Kantor Penanaman Modal (KPM) Kabupaten Malang dilakukan untuk pembenahan manajemen mutu, baik manajemen maupun mutu pelayanan., faktor pendukung manajemen mutu sesuai standar operasional prosedur (*SOP*) perencanaan dengan penguatan pada tanggung jawab manajemen yakni membentuk komitmen manajemen yang berfokus pada pelanggan dengan memastikan kebijakan mutu dan sasaran mutu melalui pengelolaan dan penyediaan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kompetensi, pelatihan dan dan kesadaran serta

prasarana yang memadai serta lingkungan kerja yang yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk.

Faktor pendukung yang ada dalam *Standar Operasional Prosedur* Kantor Penanaman Modal menekankan pada tataran manajemen dan pegawai faktor penguatan untuk menciptakan produk layanan bermutu untuk mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Penguatan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada KPM Kabupaten Malang merupakan komitmen awal intasi untuk mengimplementasikan, karena faktor sumberdaya manusia merupakan pelaku dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu.

Pegawai melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan produk, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus melakukan perbaikan untuk efektivitas serta meningkatkan kepuasan investor dengan memenuhi persyaratan investasi.

2). Sarana prasarana

Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang sebagai organisasi harus menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan sesuai dalam Standar Operasional Prosedur KPM pemeliharaan prasarana yang diperlukan dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk, sarana-prasarana mencakup peralatan proses baik hardware dan software, ruang kerja, sarana penyimpanan terkait serta jasa pendukung.

Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang secara khusus persiapan sarana dan prasarana dilengkapi, karena proses *set up* sampai dengan *final audit* semua sarana prasarana yang disebutkan pada buku pedoman sangat diperlukan. Selain sarana dan prasarana lingkungan kerja yang kondusif dengan pengelolaan lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian, istilah lingkungan kerja merupakan kondisi dimana pegawai melakukan pekerjaan dengan melihat aspek kondisi tempat kerja serta orang yang ada di dalamnya. Peningkatan lingkungan kerja dapat ditingkatkan dengan adanya kedekatan dari Manajer Area kepada bawahannya, agar suasana kerja tidak menjadi suatu bentangan antara semua pegawai. Peningkatan sarana dan prasarana akan terus dilakukan mengingat dengan adanya perbaikan yang berkelanjutan akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dalam melakukan pekerjaan, baik dalam peningkatan manajemen mutu serta peningkatan produk layanan guna kepuasan pelanggan.

b. Faktor Penghambat Investasi di Kabupaten Malang

Selama beberapa tahun sejak dibentuknya Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang hingga saat ini dari data yang ada pertumbuhan investasi di Kabupaten Malang jumlahnya bisa dikatakan sangat kecil, padahal berbagai upaya yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan juga telah didukung oleh potensi-potensi investasi yang cukup tinggi. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok bagi Kantor Penanaman Modal, Sekaligus permasalahan

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, karena diharapkan adalah tingkat investasi yang tinggi sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab kurangnya investasi yang sekaligus merupakan faktor penghambat investasi di Kabupaten Malang baik investasi dalam negeri maupun investasi asing, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern sebagai berikut:

1. Faktor Ekstern

Merupakan faktor dari luar Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang meliputi:

- A. Stabilitas keamanan dan politik nasional dan internasional, seperti instabilitas keamanan dan politik nasional pada masa reformasi, adanya tuntutan disintegrasi dari beberapa daerah di Indonesia : banyaknya konflik di daerah-daerah, baik yang berupa konflik etnis, maupun antar agama dan terjadi peledakan bom di banyak tempat, seperti peledakan bom di Bali, Makasar, Bandara Udara Soekarno-Hatta dan perkembangan terakhir peledakan bom di JW.Marriot. Selain itu, instabilitas keamanan internasional terutama pasca “Tragedi 11 September” dan semakin maraknya isu terorisme, sehingga menyebabkan turunnya minat kerjasama antar negara dalam bidang penanaman modal.

- B. Faktor yang mempengaruhi tingkat investasi di daerah adalah ada tidaknya iklim yang kondusif dalam investasi. Iklim yang kondusif tersebut dipengaruhi oleh adanya jaminan keamanan,kepatian hukum, kemudahan

prosedur administratif (Birokrasi) sehingga menarik minat investor (Mardiasmo,2002:59). Kesan yang ada bahwa iklim investasi di Indonesia belum sepenuhnya terjamin karena masih banyak demo-demo buruh. Hal ini dapat menjadi ketakutan bagi investor, terutama investor asing karena sering terjadi demo-demo buruh yang dilakukan dengan cara yang tidak rasional dan cenderung anarkis. Hal ini juga mencerminkan budaya berpikir masyarakat Indonesia yang belum dewasa.

- C. Belum adanya pemberian fasilitas yang lebih bagi investor. Sebagaimana disebutkan dalam Wijaya (2000:40), fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah bagi investor Seperti Fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan bahan baku dan bahan keperluan untuk produksi, yang dibebankan kepada investor dengan bea masuk yang cukup tinggi. Persetujuan pemberian fasilitas ini merupakan kebijakan dari BKPM atau BKPMD (Propinsi), dimana besarnya fasilitas yang diberikan tergantung dari kemampuan perekonomian suatu negara atau daerah yang bersangkutan. Pada kenyataannya masih banyak keluhan dari para investor yang merasa bea cukai impor saat ini masih memberatkan bagi investor.

2. Faktor Intern

Merupakan faktor berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sendiri, antara lain meliputi:

a. Kesulitan mendirikan perusahaan yang berada di lokasi milik Perhutani

karena harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, yaitu ijin pengalihan fungsi hutan lindung menunggu keputusan Menteri Kehutanan dan berdasarkan UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang antara lain menyebutkan bahwa setiap rencana pengalihan lahan yang masih selengkap atau tidak terpisah, dengan luas yang sama.

b. Belum adanya kawasan industri

Tersedianya kawasan industri memberikan keuntungan yang berarti, baik bagi intern perusahaan maupun bagi pemerintah, yaitu dapat mempererat hubungan antar industri sehingga mempermudah dalam memperoleh bahan mentah yang dibutuhkan, aktivitas industri tidak mengganggu aktivitas sektor lain, selain itu dapat menghemat pengeluaran pemerintah dalam membangun prasarana-prasarana yang dibutuhkan oleh industri dan meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, ada tidaknya kawasan industri di suatu daerah juga menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya.

c. Proses perijinan yang panjang dan memakan waktu yang lama.

Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang belum memberikan sistim pelayanan perijinan satu atap (*one roof service*), sehingga dalam mendapatkan surat ijin teknis yang diperlukan untuk melakukan penanaman modal masih diurus oleh unit-unit atau instansi yang terpisah. Selain itu, dengan adanya Surat Persetujuan Penanaman Modal saja belum menjamin dapat dilaksanakannya proyek investasi karena harus menunggu dikeluarkannya ijin-ijin teknis, seperti ijin lokasi, IMB, dan Ijin-ijin Undang-undang Gangguan/HO. Berkaitan dengan masalah perijinan, juga belum ditetapkannya secara jelas dan pasti biaya perijinannya (ijin teknis) di kabupaten Malang dan ada perlakuan penetapan biaya yang berbeda, terutama terhadap investor asing.

d. Belum adanya keterkaitan antara instansi

Kerjasama dan keterkaitan yang baik antara pemerintah dan Kantor Penanaman Modal dengan instansi atau unit lainnya sangat diperlukan dalam manajemen masalah Penanaman Modal, misalnya dalam penilaian suatu permohonan modal juga harus memperhatikan perencanaan tata ruang kota dan prinsip penggunaan lahan perhutani; dalam membuat Surat Persetujuan (MOU) bekerjasama dengan badan-badan hukum dan penyusunan potensi daerah serta penggalan potensi berkaitan dengan dinas-dinas yang bersangkutan.

Belum adanya keterkaitan antar instansi dalam menangani masalah penanaman modal ini dapat dilihat dari adanya kegagalan sejumlah investasi di Kabupaten Malang yang lebih disebabkan karena tidak matangnya perencanaan, selain itu kurangnya kepastian hukum. Tidak matangnya perencanaan disebabkan karena dalam perencanaan tersebut pemerintah kurang memperhatikan kerjasama dengan instansi terkait. Kegagalan rencana investasi tersebut dapat menghilangkan kepercayaan para investor lainnya terhadap pemerintah, sehingga dapat menghambat investasi di Kabupaten Malang.

Perlu diperhatikan pula, bahwa selain faktor-faktor tersebut, masih terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan kurangnya investasi di Kabupaten Malang, yaitu instabilitas ekonomi, baik ekonomi nasional maupun ekonomi internasional yang juga berpengaruh terhadap berkurangnya gairah investasi di kabupaten Malang. Sejak terjadinya krisis ekonomi, sehingga para investor masih menunggu waktu yang tepat untuk menanamkan modalnya, yaitu pada keadaan ekonomi yang diperkirakan permintaan masyarakat akan hasil produksi pada posisi yang tinggi sehingga dapat memberikan imbalan jasa (laba) yang lebih menguntungkan dan resiko kegagalan investasinya kecil.

Tingkat persaingan dengan daerah lain, terutama dengan daerah-daerah industri yang mampu menawarkan potensi dan keuntungan yang lebih besar bagi investor. Didukung pula oleh kecenderungan yang ada, bahwa para investor lebih berminat menanamkan modalnya pada bidang industri manufaktur. Hal ini dapat

dilihat dari perkembangan investasi Indonesia secara keseluruhan di Jawa Timur sendiri, bahwa peringkat pertama diduduki oleh investasi di bidang manufaktur, sedangkan di Kabupaten Malang, selain belum adanya kawasan industri, prioritas ekonomi dan prioritas investasi di Kabupaten Malang adalah pada sektor primer. Ini merupakan suatu hal yang juga bisa menyebabkan kuarngnya investor masuk ke Kabupaten Malang itu sendiri.

4. Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Meningkatkan Investasi

Pemerintahan daerah yang lebih mengacu pada fungsi yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi tersebut yaitu menjalankan tugas yang sudah ditentukan pemerintah pusat, namun di sisi lain. Pemerintah Daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah sebagai tanggung jawabnya (Muluk, 2005:10).

Pemerintah daerah sebagai salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan ekonomi daerah mempunyai peran sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, dan simulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan usaha dalam meningkatkan investasi sebagai perwujudan dari peran penting pemerintah daerah tersebut. Usaha pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam meningkatkan investasi di wilayah Kabupaten Malang ini sebenarnya dapat dilihat dari arah kebijakan yang ditetapkan, program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kantor Penanaman Modal sebagai unsur pendukung pelaksana Pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal.

Sejak berdirinya hingga saat ini sudah banyak hal yang telah dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan cara-cara yang di upayakan KPM dalam meningkatkan investasi, sebagaimana disajikan di depan, pada dasarnya merupakan upaya peningkatan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, sebagai berikut:

a. Promosi Potensi Daerah

Pemerintah memberikan informasi kepada perusahaan asing mengenai ruang lingkup kesempatan investasi, Informasi tersebut dapat disebarluaskan melalui konsultan dagang mereka yang ditempatkan di negara maju. Tujuan yang bisa dicapai antara lain untuk mengumpulkan data perundang-undangan dan data ekonomi keuangan dasar yang diperlukan oleh investor asing berkenaan dengan pendirian suatu industri dan berfungsi sebagai penengah antara investor asing dan investor dalam negeri dalam mengadakan hubungan dan memberikan panduan kepada investor asing yang potensial dalam memperoleh ijin dan fasilitas lainnya dari departemen pemerintah yang berkaitan (Jhingan,1992:629).

Promosi potensi daerah merupakan kegiatan yang memerlukan sikap proaktif dari Pemerintah Daerah untuk memperkenalkan potensi dan produk unggulan daerah yang bernilai jual tinggi kepada kalangan masyarakat kalangan dunia usaha, baik di daerah sendiri maupun luar daerah , bahkan luar negeri, sehingga diharapkan dapat menambahkan minat para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Selain mempromosikan peluang investasi, fasilitas-

fasilitas yang tersedia dan faktor pendukung lainnya, seperti kemudahan prosedur perijinan, kepastian hukum, sistem perpajakan dan keamanan yang dapat diberikan oleh daerah tersebut.

Kegiatan promosi ini telah dilakukan oleh KPM Kabupaten Malang melalui kegiatan pameran, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Dengan adanya pameran tersebut diharapkan banyak masyarakat luar daerah yang menjadi tahu akan potensi yang dimiliki Kabupaten Malang. Walaupun hasilnya belum nampak secara langsung, yaitu banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Malang, namun hal tersebut merupakan awal yang baik untuk menambahkan minat investor.

Dari kendala yang dihadapi, yaitu minimnya media promosi seperti brosur, pamflet, buku profil potensi investasi dan CD Rom tentang potensi unggulan Kabupaten Malang dan minimnya dukungan dana, selain diperlukan adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengadaan sarana tersebut serta adanya pengalokasian dana sesuai prioritas pameran, untuk dapat meningkatkan keberhasilan promosi juga diperlukan adanya hubungan langsung yang baik antara pemerintah sendiri dengan para pengusaha dan pemilik modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, akan banyak pengusaha/ pemilik modal yang secara langsung mengetahui potensi dan keadaan Kabupaten Malang.

b. Penyusunan Buku Profil Potensi Investasi dan Brosur/ Pamflet/ CD Rom tentang potensi Unggulan Kabupaten Malang

Buku Profil Potensi dan Brosur/ Pamflet/ CD Rom tentang potensi Unggulan Kabupaten Malang dibuat sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan promosi. Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat baik sebagai penyediaan informasi potensi investasi, sehingga dapat membantu masyarakat, terutama para pengusaha dan pemilik modal untuk mengetahui potensi Kabupaten Malang secara lebih detail, dimana dalam buku profil investasi ini dijelaskan lebih rinci proses produksi; prospek pemasaran; pemilihan lokasi perusahaan; kebutuhan lahan; tenaga kerja; fasilitas serta perhitungan ekonomi dari suatu rencana investasi, seperti perkiraan modal biaya produksi, pendapatan, proyek laba/rugi dan kriteria-kriteria dalam investasi (POT, ROI, BEP, kapasitas investasi), sehingga dari sini dapat dipertimbangkan kelayakan investasinya.

Saat ini buku profil investasi sangat terbatas, sebagai sarana pendukung kegiatan promosi diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas dalam penyusunan buku ini. Dalam upaya ini juga diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi terkait serta pengalokasian dana yang cukup.

c. Penyelenggaraan Forum investasi dan Temu Usaha

Forum ini merupakan wadah bagi para pihak yang berkaitan dengan bidang penanaman modal atau investasi untuk saling bertemu dan bekerjasama

serta membahas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi berkaitan dengan dunia usaha dan investasi, sehingga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antar semua pihak dan saling menguntungkan.

Melalui Forum ini pemerintah dapat menampung masukan-masukan dari para pengusaha maupun LSM berkaitan dengan upaya perbaikan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Hasil yang juga diharapkan dari adanya forum ini adalah meningkatnya jumlah pengusaha kecil yang menjalin pola kemitraan dan meningkatkan peluang bagi usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, untuk dapat meningkatkan efektivitas dari forum ini maka perlu ditingkatkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama secara intensif serta berkesinambungan dengan pihak BPKM, BPM Propinsi, Asosiasi Pengusaha Asing, Kedutaan Negara Asing maupun dengan Pengusaha Industri Kecil (UKM) dan LSM.

d. Pengendalian dan Pengawasan terhadap kegiatan PMDN dan PMA.

Kegiatan ini diperlukan tidak hanya untuk mengawasi jalannya kegiatan dan perkembangan PMDN dan PMA, tetapi juga untuk mengelola pembinaan dan saling membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi investor, sehingga dapat terjalin hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan para investor. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan penanaman PMDN dan PMA mengenai prosedur perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan ini juga dimaksudkan

untuk menjangkau proyek-proyek investasi yang belum memiliki perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat menjaga kewibawaan pemerintah dalam melaksanakan kedisiplinan dalam penyelenggaraan proyek penanaman modal sesuai dengan peraturan undang-undang penanaman modal.

Sebagaimana dicantumkan dalam pedoman pelaksanaan pengendalian penanaman modal, bahwa aspek-aspek yang diperhatikan dalam pengendalian dan pengawasan ini meliputi konsistensi Lokasi Proyek, konsistensi Bidang Usaha dan/Jenis Produksi/ Kapasitas Produksi, konsistensi pemanfaatan Barang Modal, Konsistensi Penggunaan Tenaga Kerja (TKA), konsistensi Penggunaan lahan, konsistensi Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek dan konsistensi ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan (SP). Dengan menjaga konsistensi proyek-proyek PMA dan PMDN terhadap aspek tersebut.

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan SDM yang memadai dan memahami peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal serta bidang lain yang berkaitan, seperti bidang hukum, ekonomi dan produksi. Oleh karena itu, dengan jumlah personil KPM yang terbatas yaitu 16 personil, terutama yang berkompeten dalam bidang ini, melalui rekrutmen "*merit system*" yaitu sistem penerimaan pegawai berdasarkan faktor-faktor obyektif yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dengan seleksi secara administratif dan melalui test (tulisan, lisan dan performance test), sehingga akan didapatkan pegawai yang profesional sebagaimana dibutuhkan oleh KPM.

e. Peningkatan Kinerja Kantor Penanaman Modal

Kinerja dari pegawai atau suatu organisasi adalah hasil kerja yang dinilai dari produktivitas pegawai atau organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengingat akan peran penting dari KPM dalam bidang penanaman modal dan tugas serta tanggung jawab yang cukup berat, maka diperlukan kinerja aparatur yang bagus sesuai dengan tupoksi masing-masing. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur KPM tersebut. Adapun kegiatan yang telah diikuti oleh KPM meliputi Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, magang, workshop dan lokakarya. Jadi, pada intinya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat mendukung upaya peningkatan investasi di daerah Kabupaten Malang. Untuk mendukung Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya daerah harus mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, dengan adanya otonomi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik (Kaho, 2007:66),

Beberapa usaha lainnya masih merupakan suatu perencanaan yaitu penyelenggaraan perijinan dengan sistem pelayanan 1 atap dan pembentukan zona atau kawasan investasi (kawasan industri) di Kabupaten Malang. Kemudahan perijinan dan pelayanan yang cepat diberikan oleh KPM dalam hal pembuatan Surat Persetujuan asalkan syarat-syarat yang diperlukan dipenuhi, namun dalam hal ini pembuatan ijin teknis masih ditangani oleh instansi atau dinas yang terpisah. Selain itu, belum ada penetapan biaya perijinan yang jelas

dan pasti, serta penetapan waktu penyelesaian pelayanan, perijinan dengan sistem satu atap dimungkinkan dengan adanya suatu dinas atau instansi atau unit yang menangani semua perijinan yang berkaitan dengan penanaman modal, seperti Ijin Penanaman Modal, Ijin Usaha Tetap (IUT) atau ijin perluasan usaha, Ijin mengerjakan tenaga kerja asing (IKTA), Ijin Lokasi, IMB, serta ijin Undang-Undang Gangguan/HO. Untuk memenuhi hal tersebut memerlukan proses yang cukup panjang berkaitan dengan proses pembentukan kelembagaan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam pembentukan kelembagaan pemerintah, prinsip yang perlu diperhatikan adalah “Miskin Struktur Kaya Fungsi“. Selain itu, juga perlu diperhatikan *human capital* dan *structural capital* daerah dalam menerima dan melaksanakan tanggung jawab yang akan diberikan. Dengan adanya pembentukan lembaga atau dinas baru berarti akan ada penambahan atau pengurangan serta penggabungan satuan organisasi yang ada dengan juga harus mempertimbangkan penempatan semua personil yang ada ke dalam jajaran struktur organisasi dengan tetap memperhatikan profesionalisme kerjanya. Tujuan utama dari pembentukan kelembagaan tersebut adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan optimalisasi fungsi kelembagaan daerah,

Sedangkan mengenai pembentukan kawasan investasi atau kawasan industri memerlukan perencanaan yang matang perlu memperhatikan pemilihan lokasi yang tepat dan strategis serta dampak lingkungan yang ditimbulkan yang ditimbulkan nantinya. Selain itu, yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang adalah dengan diterapkannya kebijakan penurunan tarif pajak penerangan jalan melalui Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 dari 5 % menjadi 3%. Hal ini merupakan langkah yang berani diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah untuk menarik minat investor, walaupun dengan konsekuensi adanya penurunan pendapatan daerah dari sektor pajak penerangan jalan, tetapi hal ini diharapkan dapat ditutupi dengan adanya keuntungan lain yang lebih besar yang akan diperoleh dari investasi.